

“Kalau rumah adalah tempat paling aman, kenapa rumah juga jadi tempat paling berbahaya bagi anak Indonesia?”

Diskusi terbuka. Boleh kamu setuju, boleh kamu bantah — yang penting kamu pikir.

Pembuka. Pekan ini tiga kasus berat menyita perhatian publik: kasus KDRT dengan korban balita usia tiga tahun yang viral di feed, kasus pemerkosaan anak di Solok Selatan yang berujung pada penganiayaan keluarga pelapor oleh lingkungannya sendiri, dan kasus oknum kiai padepokan di Pekalongan dengan modus pijat yang korbannya berkembang hingga puluhan santriwati. Di balik tiga kasus dengan profil berbeda ini berdiri satu pertanyaan struktural yang sulit dijawab: kalau hukum

negara, hukum agama, dan naluri kemanusiaan dasar sama-sama mengutuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, kenapa fenomena ini tetap terjadi dalam volume yang konsisten dari tahun ke tahun? Empat lensa yang biasa ditawarkan untuk menjawab — psikologis-individual, struktural-sosial, kerangka spiritual, kegagalan komunitas — semuanya benar sebagian, dan semuanya bisa dibantah dari sudut yang berbeda. Pembahasan di bawah memetakan keempatnya berikut titik lemahnya masing-masing.

Lensa pertama — psikologis-individual. Argumen yang biasa dibawa psikolog: pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap anak biasanya membawa luka masa lalu sendiri — mereka tumbuh di rumah yang kasar, melihat ayah memukul ibu, atau menjadi korban kekerasan saat anak-anak. Pola intergenerasional ini menjadi mesin yang menggandakan kekerasan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Implikasinya: pencegahan dimulai dari intervensi psikologis sejak dini, terapi trauma untuk pelaku, dan pendidikan parenting yang memutus rantai kekerasan. Tetapi lensa ini punya celah serius. Banyak pelaku yang tumbuh di rumah yang relatif sehat tetap menjadi pelaku kekerasan; sebaliknya, banyak korban kekerasan masa kecil yang bertumbuh menjadi orang dewasa yang lembut dan justru menjadi pelindung. Faktor psikologis individual penting tetapi tidak deterministik. Pertanyaan yang muncul: jika trauma masa lalu adalah penyebab utama, kenapa intervensi terapi yang berhasil di banyak negara belum mengurangi statistik kekerasan rumah tangga secara dramatis di Indonesia?

Lensa kedua — struktural-sosial. Argumen sosiolog: kekerasan terhadap perempuan dan anak bertahan karena struktur sosial yang menempatkan mereka pada posisi tergantung dan rentan. Hukum yang lambat menindak, akses bantuan hukum yang sulit, dukungan sosial

pasca-lapor yang minim, dan budaya "menjaga harmoni" yang menekan pelapor — semuanya membentuk ekosistem di mana pelaku merasa relatif aman dan korban merasa relatif tidak punya pilihan. Implikasinya: reformasi harus struktural, dari penguatan UU PKDRT, perlindungan whistleblower kasus pelecehan anak, hingga subsidi konseling untuk keluarga rentan. Tetapi lensa ini juga punya celah. Negara dengan sistem perlindungan korban yang relatif kuat masih menghadapi statistik kekerasan rumah tangga yang tinggi — yang menunjukkan struktur saja tidak cukup. Pertanyaan: apakah struktur perlindungan bisa berfungsi tanpa transformasi tata-nilai komunitas yang mengubah cara melihat korban dari "aib keluarga" menjadi "orang yang perlu dilindungi"?

Lensa ketiga — kerangka spiritual. Argumen dai: kekerasan terhadap anggota keluarga adalah pengkhianatan amanah yang Allah titipkan; Rasulullah ﷺ memberi prinsip "kullukum ra'in" — setiap manusia adalah pemegang amanah atas mereka yang ada di bawah kepemimpinannya. Pelaku KDRT melanggar amanah suami atau ayah; pelaku kekerasan seksual terhadap santriwati melanggar amanah pendidik; komunitas yang menekan pelapor melanggar amanah lingkungan. Implikasinya: penguatan etika personal lewat dakwah yang konkret, bukan dakwah yang berhenti di ritual ibadah. Tetapi lensa ini paling tajam celahnya: banyak pelaku kekerasan terhadap istri atau anak adalah orang yang shalat rutin, yang dikenal religius oleh komunitas, yang menggunakan ayat-ayat agama sebagai justifikasi atas tindakannya. Kerangka spiritual hanya berfungsi sebagai rem kalau ia hidup di hati pelaku — dan kalau ia terdistorsi (mis. interpretasi yang salah tentang otoritas suami), ia justru menjadi senjata pelaku. Pertanyaan: apakah dakwah etis bisa efektif tanpa dipasangkan dengan pendidikan literasi agama yang menolak interpretasi yang membenarkan kekerasan?

Lensa keempat — kegagalan komunitas. Argumen aktivis: ekosistem kekerasan bertahan karena komunitas memilih diam atau bahkan menekan pelapor. Kasus Solok Selatan pekan ini bukti tajam: keluarga yang melapor dianiaya oleh lingkungan sendiri. Bulugh al-Maram 1587

mempertanyakan bagaimana umat disucikan tanpa mengambil hak yang lemah dari yang kuat — yang berarti komunitas yang memilih melindungi pelaku atas dasar solidaritas yang salah arah ikut menanggung beban kolektif. Implikasinya: transformasi terjadi di tingkat lingkungan — RT, RW, masjid, arisan PKK — bukan hanya di tingkat individu atau struktur negara. Tetapi lensa ini juga punya celah. Mengubah komunitas adalah proses yang sangat lambat, dan korban yang berada dalam bahaya sekarang tidak punya waktu menunggu komunitas berubah dalam satu dekade. Pertanyaan: bagaimana keseimbangan antara intervensi struktural cepat untuk korban saat ini dan transformasi komunitas yang lambat untuk korban masa depan?

Sintesis yang tidak selesai. Keempat lensa tidak saling meniadakan; setiap lensa menangkap satu dimensi dari fenomena yang multidimensi. Yang lemah dari satu lensa biasanya diisi oleh kekuatan lensa lain — pendekatan psikologis individual terlalu lambat untuk korban yang bahaya sekarang, dibalut struktur hukum yang cepat; struktur hukum tanpa transformasi tata-nilai komunitas tetap memunculkan "aib keluarga" sebagai dinding tinggi; tata-nilai komunitas tidak akan berubah tanpa kerangka spiritual yang dihidupkan dengan benar; kerangka spiritual yang dihidupkan tanpa rem struktural bisa dimanipulasi sebagai justifikasi pelaku. Tidak ada satu pun lensa yang berdiri sebagai jawaban tunggal. Inilah kerumitan yang membuat kekerasan terhadap perempuan dan anak sulit dipadamkan secara tuntas: ia adalah masalah sistemik yang membutuhkan intervensi di empat lapis sekaligus.

Penutup. Pertanyaan poster — "kalau rumah adalah tempat paling aman, kenapa rumah juga jadi tempat paling berbahaya bagi anak Indonesia?" — sengaja dibiarkan terbuka karena jawabannya bukan satu kalimat. Jawabannya adalah perdebatan empat lensa di atas, yang setiap mahasiswa dengan latar pendidikan berbeda akan menimbang dengan bobot yang berbeda. Yang penting bukan menemukan jawaban final, melainkan memahami bahwa lensa apa pun yang dipilih sebagai prioritas, ada lensa lain yang akan menutupi celahnya — dan generasi

yang akan menjadi orang tua, tetangga, pengurus pondok, dan aktivis sosial dalam dua dekade ke depan akan diuji oleh kemampuannya memegang lebih dari satu lensa sekaligus.

| Pertanyaan

Q · 01

"Bukannya KDRT ini ranah privat keluarga, kenapa publik harus campur tangan?"

A

Pushback ini muncul dari tradisi yang menempatkan rumah sebagai ranah private yang tertutup dari intervensi luar. Tradisi ini memang punya manfaat — privasi keluarga adalah hal yang dilindungi. Tetapi tradisi yang sama menjadi tirai yang melindungi pelaku saat kekerasan terjadi di dalam rumah. Pertanyaan yang lebih produktif: kapan ranah privat berhenti dilindungi dan menjadi urusan publik? Jawabannya secara hukum dan etis sama: ketika ada hak orang lemah yang dilanggar di dalamnya. Anak yang dilukai bukan urusan privat orang tua semata; ia urusan publik karena anak adalah orang lemah yang tidak punya kekuatan untuk membela diri. Privasi keluarga tidak boleh menjadi senjata pelaku.

"Kenapa Islam yang harus diangkat sebagai kerangka? Bukan tradisi sekuler juga punya kerangka anti-kekerasan?"

A

Tradisi sekuler memang punya — HAM, gender equality, child protection adalah kerangka yang kuat. Yang ditawarkan kerangka Islam dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim adalah motivasi yang lebih dalam: bahwa amanah perlindungan keluarga adalah ibadah yang ditanyakan di akhirat, bukan hanya kewajiban hukum yang bisa dikalkulasi probabilitas terlepasnya. Mahasiswa non-Muslim bisa pakai kerangka HAM dan ditambah dengan tradisi etis mereka sendiri. Pertanyaan kebalikannya yang sah: apakah kerangka spiritual cukup hidup di hati pelaku untuk menjadi rem nyata, atau ia sudah lapuk menjadi cangkang ritual? Itu yang harus diselesaikan, terlepas dari label tradisinya.

Q · 03

"Bukannya ada banyak ustadz dan kiai yang justru pelakunya — kenapa harus dengerin dakwah anti-kekerasan dari komunitas yang sama?"

A

Pushback ini sangat valid pasca-kasus padepokan Pekalongan. Pesan harus dievaluasi dari isi dan dalilnya, bukan dari pembawanya — tetapi konsistensi messenger memang mempengaruhi seberapa cepat audiens mau mendengar. Konsekuensinya bukan menolak pesan, melainkan menuntut reformasi internal komunitas dakwah: protokol perlindungan santriwati di setiap pesantren, jalur pelaporan yang aman, transparansi audit ke pengurus pusat, dan ketegasan mengeluarkan oknum yang terbukti bersalah. Komunitas Muslim yang serius dengan amanah anak akan menerapkan standar yang sama beratnya ke oknum di dalamnya seperti yang dituntut untuk pejabat publik di luar.

Q · 04

"Kalau intervensi struktural lambat dan transformasi komunitas lebih lambat, korban yang sekarang bahaya bagaimana?"

A

Pertanyaan tajam yang tidak punya jawaban yang nyaman. Intervensi yang tersedia sekarang: hotline darurat (Komnas Perempuan, KPAI, hotline 129) untuk respons cepat; rumah aman sementara melalui lembaga LBH atau yayasan perlindungan perempuan; pendampingan hukum pro-bono di kasus pemerkosaan dan KDRT. Yang sering hilang adalah bridging — orang dewasa di lingkungan korban yang membantu mereka mengakses sumber daya yang sudah ada. Inilah peran komunitas RT/RW/PKK/masjid yang konkret: bukan menjadi penyelamat, melainkan menjadi jembatan ke sistem yang sudah dibangun.

"Saya laki-laki yang tidak pernah memukul, kenapa harus merasa bertanggung jawab atas masalah KDRT yang dilakukan laki-laki lain?"

A

Tidak ada beban dosa pribadi atas tindakan orang lain. Tetapi ada amanah kolektif sebagai bagian dari komunitas: laki-laki yang tidak pernah memukul punya kredibilitas khusus untuk mengoreksi laki-laki lain yang melakukannya — kredibilitas yang perempuan tidak punya di banyak konteks budaya. Ketika ada teman atau kerabat laki-laki yang bercanda meremehkan istri, atau bercerita memukul anak dengan nada bangga, atau menyalahkan korban pemerkosaan — diam adalah bentuk dukungan terhadap kekerasan. Bersuara, bahkan dalam bentuk koreksi pelan, adalah ibadah yang sangat besar nilainya karena ia mengubah norma laki-laki di komunitas tertentu. Itu peran yang tidak bisa dialihkan ke perempuan atau lembaga negara.